

Soepomo di Dunia Pers: Kiprahnya dalam Majalah Mimbar Indonesia (1947-1958)

Ronitua Arif Siregar¹, Nur'aeni Marta², Muhammad Hasmi Yanuardi³.

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, 13220, Indonesia, ronituaarifsiregar97@gmail.com

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, 13220, Indonesia, nuraeni@unj.ac.id

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, 13220, Indonesia, mhasmiyanuardi@unj.ac.id

* Corresponding email: ronituaarifsiregar97@gmail.com

Abstract

Soepomo is known as a national hero who has contributed a lot in the field of law in Indonesia. This study discusses the other side of Soepomo, namely his work in the world of the press. The method used in this research is the historical method which consists of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The source materials used in this research are in the form of written magazines and books. The results show that Soepomo is one of the leading figures in the Indonesia press. He is one of the founders of the Mimbar Indonesia magazine. The positions he occupied were from the Editorial Board to the Advisory Board. Because of his work in this magazine, Soepomo was appointed as a member of Honory Council of the Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Keywords

Soepomo; Press; Mimbar Indonesia

Abstrak

Soepomo dikenal sebagai pahlawan nasional yang banyak berjasa dalam bidang hukum di Indonesia. Penelitian ini membahas sisi lain dari Soepomo, yaitu kiprahnya dalam dunia pers. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Bahan sumber yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk tertulis berupa majalah dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Soepomo termasuk ke dalam tokoh pers Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh pendiri dari majalah Mimbar Indonesia. Jabatan yang didudukinya adalah sebagai Dewan Redaksi hingga menjadi Dewan Penasihat. Karena kiprahnya dalam majalah ini, Soepomo diangkat sebagai anggota dari Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Kata kunci

Soepomo; Pers; Mimbar Indonesia

*Received: 22 September 2021

*Revised: 1 October 2021

*Accepted: 29 October 2021

*Published: 30 October 2021

Pendahuluan

Soepomo merupakan tokoh pahlawan nasional dan ikut menjadi bagian dari *the founding fathers* bangsa Indonesia. Pada umumnya namanya seringkali disebutkan di dalam peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Soepomo menjadi salah satu orang

yang ikut serta dalam menyampaikan rumusan dasar negara di sidang pertama BPUPKI yang terjadi pada 29 Mei-1 Juni 1945 selain Soekarno dan Muhammad Yamin (Poesponegoro, 2008). Kemudian, dirinya juga berperan penting dengan menjadi ketua dari Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar di dalam sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945. Karena peristiwa ini akhirnya ia dijuluki sebagai Arsitek UUD 1945 dan diangkat menjadi pahlawan nasional.

Selama ini Soepomo selalu ditampilkan sebagai tokoh hukum yang banyak berkecimpung dalam dunia birokrasi, baik pada saat masih masa penjajahan maupun pada masa Indonesia sudah merdeka. Di dalam masa penjajahan Belanda ia bekerja di lembaga pengadilan. Pada masa pendudukan Jepang dirinya banyak menjabat posisi strategis bidang hukum di pemerintahan pusat. Saat Indonesia merdeka ia menduduki posisi sebagai Menteri Kehakiman. Secara keseluruhan selama masa hidupnya telah mengabdikan sebanyak 26 jabatan penting di dalam dunia pemerintahan maka tidak heran ia seringkali disebut sebagai seorang birokrat (Aning S., 2005). Selain itu, dikenal juga sebagai Rektor Universitas Indonesia yang kedua dengan masa jabatan dari tahun 1951-1954.

Soepomo memiliki sisi lain dari kehidupannya yang belum dibahas di dalam kajian-kajian yang ada sebelumnya. Ada tiga penelitian ilmiah mengenai dirinya yang telah dilakukan sampai saat ini. Kajian pertama dilakukan oleh Soegito pada tahun 1977 dengan bukunya berjudul *Prof. Mr. Dr. R. Supomo* yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini berisi tentang riwayat hidup Soepomo. Kemudian, buku *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945* yang diterbitkan pada tahun 1994 dan ditulis oleh Marsilam Simanjuntak. Buku ini secara khusus membahas tentang pemikiran negara integralistik Soepomo. Kajian yang terbaru ada buku dengan judul *Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, dan Konstitusionalisme* yang diterbitkan pada tahun 2015 dengan penyusun Jimly Asshiddiqie. Pembahasan dari buku ini berisi tentang pemikiran-pemikiran hukum yang dimiliki oleh Soepomo.

Sisi kehidupan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan belum dijelaskan dalam penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah kiprah Soepomo di dalam dunia pers. Soepomo yang dikenal sebagai seorang birokrat berkiprah di dunia pers merupakan sesuatu hal yang berbeda dilihat dari perjalanan hidupnya selama ini. Di masa setelah kemerdekaan Indonesia Soepomo tercatat sebagai salah satu tokoh penting di dalam majalah *Mimbar Indonesia*. Hal itu yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Artikel ini akan memfokuskan kajiannya terhadap kiprah Soepomo dalam dunia pers yang banyak terjadi di majalah *Mimbar Indonesia*.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985). Metode sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, verifikasi,

interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama, heuristik yang berarti kegiatan penulis untuk mengumpulkan atau mencari berbagai sumber data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini sudah tentu majalah *Mimbar Indonesia*, sedangkan sumber sekundernya berupa buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber-sumber tersebut diperoleh penulis terutama dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Tahap kedua, verifikasi yang merupakan kritik terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan sebelumnya. Ada dua macam verifikasi yang dilakukan, yaitu kritik ekstern (otentisitas) dan kritik intern (kredibilitas). Tahap ketiga, interpretasi yang artinya penulis melakukan penafsiran fakta sejarah dengan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan rasional atau disebut juga sebagai analisis sejarah. Tahap keempat, historiografi yang diartikan sebagai proses penyusunan fakta-fakta sejarah yang telah diseleksi pada sebelumnya dalam bentuk tulisan ilmiah. Adapun untuk penyajian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif naratif.

Hasil dan Pembahasan

Perjalanan Hidup Soepomo

Soepomo lahir pada 22 Januari 1903. Ia merupakan anak pertama dari pernikahan Raden Tumenggung Wignyodipuro, Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan Raden Ajeng Renak Wignyodipuro (Soegito, 1977). Dirinya lahir dan dibesarkan pada masa diterapkannya kebijakan Politik Etis. Sebuah kebijakan yang juga dikenal dengan Politik Balas Budi yang berisi bahwa bangsa Belanda memiliki tanggung jawab moral terhadap tanah jajahannya atas keuntungan-keuntungan yang telah diperolehnya (Niel, 2009). Politik Balas Budi terbagi menjadi trias etika, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Diberikan berbagai fasilitas-fasilitas yang terkait dengan tiga bidang tersebut. Di dalam program edukasi banyak menghasilkan orang-orang yang berpendidikan.

Sebagai orang yang berasal dari keluarga bangsawan maka sudah tentu Soepomo dapat menikmati fasilitas pendidikan (Soegito, 1977). Ia mengawali pendidikannya dengan bersekolah ke *Europeesche Lagere School* (ELS) di Boyolali dan menamatkannya pada tahun 1917. Kemudian, melanjutkan sekolahnya ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Surakarta. Setelah tamatnya dari MULO pada tahun 1920 ia melanjutkan pendidikannya ke *Rechtshcool* (Sekolah Hukum) di Batavia (Jakarta). Lulus dari *Rechtschool* pada tahun 1923 ia mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai negeri yang diperbantukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen. Tidak lama berselang Soepomo mendapatkan beasiswa (*studieopdracht*) ke Universitas Leiden Belanda di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Adat.

Banyak aktivitas kebangsaan yang diikuti Soepomo sepanjang masa hidupnya. Diawali dengan bergabung di Jong Java pada saat masih menempuh pendidikan di MULO, bahkan ia terpilih menjadi ketua Jong Java cabang Surakarta (Rahman et al.,

2015). Pada saat di *Rechtschool* dirinya berkenalan dengan dunia politik dan kebangsaan secara lebih luas. Banyak berinteraksi dengan para pelajar dari Sekolah Dokter Jawa atau *School tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA)* yang terkenal dengan aktivis politik pergerakannya hingga dirinya dapat bertemu dengan Soetomo yang merupakan tokoh pendiri Budi Utomo (Martha, 1985). Kemudian, pada saat berkuliah di Universitas Leiden ia bergabung di dalam Perhimpunan Indonesia (Ingleson, 2018). Sekembalinya ke tanah air dari kuliahnya, ia terus aktif dalam mengikuti pergerakan bangsanya dengan bertugas sebagai wakil ketua Budi Utomo dari tahun 1928-1930 (Salim, 2019). Pada 22 Desember 1928 dirinya mengikuti Kongres Perempuan Indonesia yang pertama sebagai perwakilan dari Budi Utomo (Blackburn, 2007). Di dalam politik praktis Soepomo ikut ambil bagian dalam Partai Indonesia Raya (Parindra) yang dipimpin oleh Soetomo (Halkis, 2017).

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda Soepomo banyak bekerja di lembaga pengadilan (Soegito, 1977). Berawal sebagai pegawai yang diperbantukan hingga mencapai posisi tertinggi dengan terpilih menjadi Ketua Pengadilan Negeri seperti di Yogyakarta dari tahun 1928-1930 atau di Purworejo dari tahun 1932-1938. Ia juga sempat diberi tugas sebagai pegawai tinggi pada *Departement van Justitie* dari tahun 1930-1932. Sebagai orang yang berprestasi di dunia akademik maka tidak heran dirinya diangkat sebagai dosen dan guru besar di *Rechtshogeschool*. Selain itu, ia juga tercatat bertugas sebagai anggota dalam Komisi Visman.

Di masa pendudukan Jepang Soepomo banyak bekerja di pusat pemerintahan. Dirinya mendapatkan jabatan-jabatan penting. Ia diangkat sebagai Pejabat Kepala Kantor Perundang-Undangan (*Hooki Kyoku Cho*) yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman (*Shihobu*) dan sebagai anggota Mahkamah Agung (*Saikoo Hooiin*), bahkan hingga mencapai posisi sebagai Kepala Departemen Kehakiman (*Shijobucho*) (Gunseikanbu, 1944). Kedudukan yang paling penting pada masa ini bagi Soepomo untuk Indonesia adalah ketika berperan sebagai anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dirinya banyak memberikan jasa dalam bidang konstitusi negara Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka Soepomo semakin menjadi tokoh penting untuk negara ini (Soegito, 1977). Dirinya menduduki posisi sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia pertama. Setelah tidak menjabat sebagai menteri, dirinya diangkat untuk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Peranan yang sangat penting dilakukannya adalah ketika bergerak dalam diplomasi Indonesia-Belanda. Ia mengikuti perundingan Renville, Perundingan Roem-Roijen hingga Konferensi Meja Bundar (KMB). Setelah itu ia diangkat kembali sebagai Menteri Kehakiman di pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dirinya juga pernah diangkat dalam jabatan penting lainnya seperti sebagai seorang Presiden Universitas Indonesia (1951-1954) dan Duta Besar RI untuk Inggris (1954-1956). Hingga wafatnya pada 12 September 1958 ia pun masih mengabdikan untuk bangsa Indonesia dengan bertugas sebagai anggota Panitia Negara Urusan Konstitusi.

Berkiprah Ke Dalam Dunia Pers Indonesia

Pers secara etimologis berarti barang cetakan, alat cetak, atau tekanan, sedangkan secara teoritis diartikan sebagai semua sarana komunikasi periodik (Wahyudi, 1991). Dimaknai seperti itu karena proses pembuatan surat kabar atau majalah dilakukan setelah melalui proses penekanan atau percetakan. Menurut UU No. 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Fungsi pers secara umum adalah mewujudkan keinginan untuk mendapatkan dan memberikan informasi kepada orang lain (Kusumaningrat, 2012). Pers memiliki fungsi yang sangat penting bagi suatu negara, tidak terkecuali dengan Indonesia. Setelah mencapai kemerdekaannya, Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraihinya terutama ketika kedatangan kembali Belanda ke tanah air. Perjuangan dilakukan dengan dua cara, yakni jalur bersenjata (militer) dan jalur diplomasi. Pers muncul menjadi salah satu motor penggerak karena menjadi media untuk memberikan dan membangkitkan semangat dalam mengarungi perjuangan. Hal itu dapat terlihat dengan hadirnya tulisan-tulisan, pengumuman, berita, dan karikatur yang berkaitan dengan perjuangan.

Para pelopor pers di negara-negara berkembang adalah orang-orang yang juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan terhadap penjajahan (Kusumaningrat, 2012). Berdasarkan fakta sejarah dapat disebut bahwa hampir keseluruhan tokoh pergerakan kebangsaan dan nasionalisme bangsa Indonesia merupakan tokoh pers (Rahzen, 2007). Soepomo menjadi salah satu orang yang tidak bisa diabaikan dalam dunia pers terutama setelah Indonesia merdeka. Dirinya merupakan salah satu tokoh penting dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Posisi tertinggi di dalam PWI ialah jabatan sebagai Dewan Kehormatan. Tokoh-tokoh yang diangkat menjadi Dewan Kehormatan PWI, antara lain Haji Agus Salim sebagai ketua, Mohammad Natsir sebagai wakil ketua, dan anggotanya terdiri dari Soepomo, Roeslan Abdulgani, dan Djawoto (Notodidjojo et al., 1977). Mereka yang terpilih tersebut memiliki jasa penting dalam perkembangan pers Indonesia.

Diangkatnya Soepomo sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI pada 24 September 1952 tidak lepas karena peranan pentingnya di dalam majalah *Mimbar Indonesia*. Di tempat inilah kiprahnya di dalam dunia pers dapat dilihat. *Mimbar Indonesia* adalah sebuah majalah mingguan yang didirikan oleh tiga tokoh nasional, antara lain Soekardjo Wirjopranoto, Pangeran Mohammad Noor, dan Soepomo (Redaksi, 1952a). Majalah ini terbit dari tahun 1947-1966. *Mimbar Indonesia* mempunyai semboyan sebagai “Madjalah Bergambar Merdeka diselenggarakan untuk Pembangunan Politik, Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan” (Redaksi, 1952a).

Soekardjo Wirjopranoto dan Pangeran Mohammad Noor menjadi sosok penting yang mengantarkan Soepomo terjun ke dunia pers. Soekardjo Wirjopranoto adalah tokoh pergerakan nasional yang lahir pada 5 Juni 1903 di Cilacap dan dikenal sebagai juru bicara ulung Fraksi Nasional di *Volksraad* (Manus et al., 2006). Soekardjo Wirjopranoto pernah bertugas sebagai anggota pengurus *Soeara Parindra* (majalah resmi Parindra) dan pemimpin umum surat kabar *Asia Raja*. Adapun Pangeran Mohammad Noor adalah cucu dari Raja Banjar Sultan Adam al-Watsiq Billah yang lahir pada 24 Juni 1901 dan dikenal sebagai Gubernur Kalimantan pertama (Manus et al., 2006). Partai Indonesia Raya (Parindra) menjadi tempat awal bertemunya mereka bertiga. Kebersamaan ketiganya terus berlangsung hingga menjadi anggota dari BPUPKI. Kolaborasi ketiganya secara lebih intens terjadi di dalam majalah *Mimbar Indonesia* dengan bersama-sama sebagai pendiri sekaligus juga pengelolanya.

Pers seringkali dijadikan sebagai alat perjuangan oleh para tokoh-tokoh nasional. Hal ini disebabkan karena pers menjadi alat untuk menyebarkan gagasan atau pemikiran kebangsaannya. Soepomo yang merupakan tokoh intelektual Indonesia sudah tentu pers menjadi tempat untuk menyebarkan gagasan yang dimilikinya secara lebih luas. Pers bermanfaat untuk mencerdaskan bangsa dan memiliki pengaruh besar karena menjadi pembentuk opini publik. Keberadaan pers sangat berpengaruh penting di dalam menggerakkan masyarakat ke arah kemajuan. Karena hal-hal yang seperti itu membuat Soepomo terjun ke dunia pers dengan membentuk majalah *Mimbar Indonesia*.

Sejarah Perkembangan Majalah *Mimbar Indonesia*

Mimbar Indonesia menjadi bagian dari media pers yang terbit dalam bentuk majalah di Indonesia. Majalah *Mimbar Indonesia* terbit pada masa pemerintahan Soekarno. Edisi pertama majalah ini terbit pada 10 November 1947 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional (Redaksi, 1952a). Alasan pemberian nama majalah ini dengan *Mimbar Indonesia* adalah diharapkan sesuai dengan namanya berkeinginan menjadi suatu mimbar tempat rakyat untuk memberikan pandangan tentang soal-soal mengenai Indonesia maupun Dunia dalam bidang kenegaraan dan kemasyarakatan, terutama soal-soal yang mengenai pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan (Redaksi, 1952a). Munculnya majalah ini tidak lepas dari peristiwa Balai Pustaka yang telah diambil alih oleh Belanda setelah Agresi Militer I (Lindsay, 2011). Belanda datang kembali ke tanah air dengan maksud untuk menduduki Indonesia. Situasi tersebut yang melatarbelakangi pembentukan dari majalah *Mimbar Indonesia*. Surat kabar dan majalah yang hadir pada saat itu menjadi sesuatu hal yang penting. Tulisan-tulisannya membuat rakyat dapat mengikuti perkembangan perjuangan bersenjata dan diplomasi yang sedang dilakukan (Penerangan, 1986).

Majalah *Mimbar Indonesia* dibentuk dengan tujuan memberikan penerangan, menanamkan semangat, dan keyakinan bernegara ketika Indonesia berusaha diduduki

oleh Belanda (Purba & Darmadi, 2019). Misi dari majalah ini adalah untuk mempersatukan kembali daerah-daerah yang tergabung dalam *Bijeenkomst voor Federale Overleg* (BFO) dan Republik Indonesia (Zuhri, 1981). Majalah ini berupaya menjadi alat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan membawa suara-suara perjuangan yang disampaikan melalui tulisan-tulisannya. Sebagai bagian dari Pers Perjuangan maka sudah tentu diusahakan oleh 100% tenaga dan kapital Indonesia (Jassin, 1984). Redaksi majalah ini diduduki oleh Soekardjo Wirjopranoto (Penanggung Jawab), Adinegoro, dan Soepomo (Redaksi, 1948). Susunan redaksi beberapa kali mengalami perubahan. Adapun percetakannya dikelola Yayasan Dharma yang dipimpin oleh Pangeran Mohammad Noor.

Majalah *Mimbar Indonesia* yang berasal dari Jakarta ini terbit setiap hari Sabtu dengan alamat redaksi di Jalan Cikini 31 dan percetakannya di Jalan Gondangdia Lama 4 (Redaksi, 1948). Pengantar tulisan majalah ini menggunakan bahasa Indonesia ejaan lama. Secara fisik ukuran majalahnya sebesar 20x15 cm dan ketebalannya paling sering berjumlah 32 halaman. Majalah ini memberikan tempat untuk iklan yang juga menjadi sumber pendapatan selain penjualan majalah itu sendiri. Harga berlangganan untuk majalah ini perbulan sebesar Rp. 12,00 dan ecerannya sebesar Rp. 3,00. Harga majalah tersebut terus mengalami perubahan. Jumlah tiras dari penjualan majalah ini sebanyak 5.000 eksemplar (Santosa & Djamar, 2012). Pihak redaksi menyatakan bahwa majalah *Mimbar Indonesia* tersebar ke berbagai daerah di Indonesia dan di luar negeri seperti Singapura, Leiden, Den Haag, New Delhi (India), Karachi (Pakistan), Kairo (Mesir), Canberra (Australia), New York (USA), Manila (Filipina), London (Inggris), Jeddah (Arab Saudi), dan Zurich (Swiss) (Lindsay, 2011).

Majalah *Mimbar Indonesia* bukan termasuk dalam media pers partisan, melainkan media pers independen. Majalah ini merasa memiliki tanggung jawab untuk mencurahkan dirinya kepada cita-cita bangsa secara seksama dan menyatakan diri sepenuhnya bebas dari segala pertalian partai politik atau golongan apapun (Lindsay, 2011). Menurut Gajus Siagian bahwa majalah *Mimbar Indonesia* tidak mengikuti suatu aliran politik tertentu, kemudian juga Andries Teeuw menyatakan majalah ini relatif bebas dari partai politik walaupun menurut pengamatannya majalah *Mimbar Indonesia* secara politis dekat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan surat kabar *Merdeka* (Lindsay, 2011). Beberapa pengurus redaksi memang bergabung ke partai politik, tetapi mereka tidak membawa majalah ini sebagai alat dari partai politik yang diikutinya. Soepomo bergabung di Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) dan Pangeran Mohammad Noor aktif dalam Partai Nasional Indonesia (PNI). Majalah ini secara konsisten hingga akhir terbitnya tidak menjadi suatu alat partai politik manapun.

Majalah *Mimbar Indonesia* dalam perjalanannya mengalami beberapa kali tidak melakukan penerbitan disebabkan oleh berbagai alasan yang berbeda-beda. Pada saat terjadinya peristiwa Agresi Militer I majalah ini dilarang terbit oleh Belanda disebabkan karena memuat foto yang disebut sebagai “Gerbong Maut Banyuwangi” (Santosa & Djamar, 2012). Foto tersebut memperlihatkan tentara Indonesia yang berada di dalam

gerbong itu dibiarkan menderita. Pada bulan Januari 1949 majalah ini tidak terbit sama sekali disebabkan keadaan organisasi dan keuangan yang goyah akibat dari pengasingan Soekardjo Wirjopranoto bersama Pangeran Mohammad Noor oleh Belanda (Jassin, 1984). Hal tersebut akibat dari terjadinya Agresi Militer II yang dilakukan oleh Belanda. Majalah ini juga pernah mengalami penutupan sementara oleh pihak militer Indonesia setelah terjadinya peristiwa demonstrasi pada 17 Oktober 1952 (Redaksi, 1952b).

Dekade 1960-an merupakan masa sulit yang mesti dihadapi oleh majalah *Mimbar Indonesia*. Di dalam beberapa waktu tertentu tidak melakukan penerbitan disebabkan karena kesulitan dalam pendanaan untuk produksi. Pendapatan yang diperoleh tidak dapat memenuhi proses untuk percetakan. Keadaan pendapatan mengecewakan karena oplahnya tidak mengalami kenaikan, kemudian ongkos cetak dan kertas setiap bulannya sejumlah Rp 64.000 untuk 4 nomor hanya menghasilkan uang masuk yang tidak sampai setengahnya (Jassin, 1984). Selain itu, majalah ini memiliki utang kepada pihak percetakan. Permasalahan-permasalahan tersebut belum dapat terselesaikan hingga bertahun-tahun, meskipun majalah ini akhirnya hanya terbit satu bulan sekali. Akibat masalah ini pada tahun 1966 majalah *Mimbar Indonesia* secara resmi berhenti terbit untuk selamanya.

Peranan Soepomo Dalam Majalah *Mimbar Indonesia*

Soepomo adalah salah satu penggagas dari terbentuknya majalah *Mimbar Indonesia*. Pada masa awal berdirinya majalah ini Soepomo menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Redaksi (Redaksi, 1948). Baginya majalah *Mimbar Indonesia* menjadi tempat untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang dimilikinya kepada khalayak umum. Tujuannya adalah membentuk pikiran masyarakat supaya konsisten berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pemikiran tentang pentingnya bentuk negara kesatuan merupakan hal utama yang harus disampaikan dalam situasi genting pada masa Revolusi. Melalui tulisannya yang dimuat di dalam majalah, dirinya berupaya mengajak kepada rakyat untuk ikut berjuang mempertahankan kesatuan bangsa dengan yang terpenting menolak Belanda dapat berkuasa kembali di Indonesia seperti pada masa kolonialisme dulu. Membuat sebuah tulisan menjadi cara yang paling tepat bagi Soepomo karena ia bukan seorang orator.

Tema-tema politik seperti itu yang menjadi kemampuan Soepomo di dalam majalah *Mimbar Indonesia*. Nilai tersendiri dari Soepomo ialah memandang politik dengan sudut pandang dari ilmu hukum, tidak seperti lainnya yang kebanyakan hanya memakai aspek politik saja. Ia merupakan orang yang paling ahli dalam bidang hukum pada masa itu. Kompetensi yang dimilikinya membuat ia menjadi tumpuan bagi majalah ini mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek hukum. Sebagai orang yang aktif dalam dunia birokrasi maka ia tidak seperti orang-orang yang seluruh aktivitas yang dimilikinya hanya diberikan untuk menjalankan sebuah media pers saja. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang mesti dijalankan olehnya. Dirinya harus dapat mengatur mana yang menjadi

prioritasnya. Oleh karena itu, terkadang ia secara sementara non-aktif dalam beberapa waktu untuk mengasuh majalah ini.

Soepomo harus berhenti sementara untuk terlibat di majalah *Mimbar Indonesia* ketika ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman dalam pemerintahan Republik Indonesia Serikat (Redaksi, 1950). Dirinya harus menonaktifkan diri karena harus fokus dalam mengemban tugasnya sebagai seorang menteri. Jabatan menteri bukanlah posisi yang sembarangan sebab dirinya bertugas untuk menentukan arah hukum negara Indonesia. Berakhirnya pemerintahan RIS pada 7 September 1950 membuat secara otomatis Soepomo berhenti sebagai seorang menteri. Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri ia aktif kembali di dalam majalah *Mimbar Indonesia*. Ia diangkat kembali sebagai Dewan Redaksi (Redaksi, 1951).

Pencapaian penting yang dimiliki Soepomo dalam majalah *Mimbar Indonesia* adalah ketika dirinya diangkat sebagai anggota Dewan Kehormatan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) (Notodidjojo et al., 1977). Memperoleh jabatan di dalam PWI maka ia berkecimpung secara lebih luas dalam dunia pers Indonesia. Ia tidak hanya mengelola majalah yang diasuhnya saja, tetapi juga ikut memantau segala media pers yang ada. Menemukan dan mengatasi persoalan dari media pers yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik merupakan tugasnya dalam jabatan ini.

Pada tahun 1955 majalah *Mimbar Indonesia* membentuk suatu jabatan baru dalam susunan redaksi. Jabatan tersebut diberi nama Dewan Penasihat. Posisi ini hanya diduduki oleh Soepomo dan Soekardjo Wirjopranoto (Redaksi, 1955). Dibentuknya posisi ini tidak lepas karena kesibukkan dari kedua tokoh tersebut. Soepomo diangkat sebagai Duta Besar untuk Inggris, sedangkan Soekardjo Wirjopranoto diangkat sebagai Duta Besar untuk Tiongkok. Sesuai dengan namanya maka tugasnya hanya memberikan nasihat-nasihat saja. Jabatan tersebut membuat Soepomo tidak seperti pada masa sebelumnya yang bekerja aktif di dalam redaksi. Posisi tersebut ia jabat selama tiga tahun sebelum akhirnya harus berhenti untuk selamanya pada 12 September 1958 karena meninggal dunia secara mendadak akibat sakit serangan jantung. Soepomo telah berkiprah dalam majalah *Mimbar Indonesia* selama 11 tahun. Begitu banyak hal yang telah diberikan olehnya untuk majalah yang didirikannya ini.

Melalui majalah *Mimbar Indonesia* ini dapat mengetahui bagaimana pemikiran-pemikiran dari Soepomo. Selain sebagai pengurus redaksi ia juga terhitung aktif sebagai kontributor. Tulisan-tulisan Soepomo yang dimuat dalam majalah *Mimbar Indonesia* dapat terhitung banyak jumlahnya. Tulisannya kebanyakan berkaitan dengan kenegaraan dan hukum. Tulisan dari Soepomo biasa diletakkan di urutan pertama dari susunan kolom tulisan majalah. Pada lembar halaman ketiga atau keempat menjadi tempat biasa diletakkannya tulisan dari Soepomo. Tulisan-tulisannya yang dimuat dalam majalah ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Periode Pertama (1947-1949) dan Periode Kedua (1951-1958).

Pada periode pertama tulisan Soepomo banyak berkaitan dengan diplomasi Indonesia dengan Belanda. Hal ini tidak terlepas karena dirinya menjadi salah satu orang yang aktif mengikuti berbagai perundingan. Sebelas tulisan pertamanya yang dimuat dalam majalah ini telah dikumpulkan menjadi satu oleh Yayasan Dharma yang juga penerbit majalah ini dalam bentuk buku dengan judul *Soal: Negara Indonesia Serikat dan Uni Belanda-Indonesia*. Tulisan-tulisannya yang dimuat di dalam buku tersebut, antara lain “Negara Kesatuan atau Negara Serikat?”, “Seruan paling achir Dr. Beel”, “Pemerintah Serikat, Arti dan Sjarat-Sjaratnja”, “Pembentukan Konstitusi Indonesia Serikat”, “Hal-hal jang harus dimuat dalam Konstitusi Indonesia Serikat”, “Sekali lagi, hal-hal jang harus dimuat dalam Konstitusi Indonesia Serikat”, “Pembentukan Pemerintah Interim”, “Soal Uni Belanda-Indonesia”, “Dasar-dasar Tata-Hukum Negara Indonesia Serikat”, “Sekali lagi, dasar-dasar Tata-Hukum Negara Indonesia Serikat”, dan “Rentjana Perobahan Undang2 Dasar Belanda” (Supomo, 1948). Tulisan-tulisan tersebut banyak memberikan penjelasan tentang pemikiran-pemikiran dari Soepomo untuk konstitusi negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Dirinya secara konsisten masih memberikan banyak tulisan yang berhubungan dengan diplomasi antara Indonesia-Belanda hingga berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB).

Adapun di periode kedua cenderung temanya lebih bervariasi daripada sebelumnya. Tidak hanya menyentuh satu tema saja, tetapi menyinggung banyak hal. Tema yang diangkatnya, antara lain situasi yang terjadi di nasional maupun internasional, politik luar negeri, ekonomi, dunia akademisi, ilmu hukum khususnya hukum adat dan hukum tata negara, dan tentu saja masih melanjutkan tulisan tentang diplomasi Indonesia dengan Belanda. Berkaitan dengan situasi yang terjadi di nasional dapat dilihat dalam tulisan “Soal pembaharuan Kabinet” (20 Januari 1951) atau tulisan berjudul “Perkembangan Demokrasi Parlementer di Indonesia” (3 Februari 1951). Sedangkan, dalam tema situasi dunia internasional ada tulisan “Sekitar Penjiapan Pakt Pasifik” (24 Februari 1951) yang membahas tentang pembentukan kerjasama antar negara oleh Amerika Serikat untuk melawan Blok Timur. Untuk politik luar negeri contohnya tulisan yang berjudul “Hubungan Indonesia dengan Negara2 Tetangga” (17 Maret 1951) dan “Politik Luar Negeri Indonesia (Perjuangan didalam dan diluar P.B.B.)” (7 April 1951). Adapun untuk tema ekonomi ada tulisan “Pasal 19 Persetudjuan Keuangan dan Perekonomian” (12 Mei 1951). Berikutnya berhubungan dengan Soepomo sebagai seorang akademisi dapat dilihat contohnya dalam tulisan “Soal Perguruan Tinggi” (10 Maret 1951) dan “Sekitar terbentuknja Gerakan Mahasiswa Djakarta” (26 Mei 1951). Berkenaan dengan ilmu hukum terdapat tulisan “Soal status quo Irian menurut Hukum Negara” (21 April 1951) atau “Sifat dan suasana tradisionil hukum adat” (19 Juli 1952). Mengenai diplomasi antara Indonesia dengan Belanda dapat dilihat contohnya dalam tulisan “Penindjauan kembali perdjanjian2 K.M.B. Hal pembubaran Uni” (13 Januari 1951) atau “Hubungan Indonesia-Belanda” (27 Maret 1951). Masih banyak lagi tulisan-tulisannya yang dimuat di dalam periode ini, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada

periode pertama. Tulisan Soepomo yang termuat dalam dua periode ini jika dijumlahkan dapat mencapai puluhan karangan. Karena begitu banyak maka tidak dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tulisan ini.

Kesimpulan

Soepomo dikenal sebagai pahlawan nasional yang berperan penting dalam hukum ketatanegaraan Indonesia. Terdapat sisi lain dari sosok Soepomo yang belum banyak dibahas seperti kiprahnya dalam penyusunan konstitusi Indonesia, yaitu kiprahnya di dalam dunia pers. Ia merupakan salah satu orang yang ikut mendirikan sebuah media pers di Indonesia. Soepomo adalah salah satu tokoh pendiri dari majalah *Mimbar Indonesia* yang merupakan majalah terbitan tahun 1947-1966. Banyak yang telah diberikannya untuk majalah *Mimbar Indonesia*. Selain sebagai pendiri ia juga terlibat di dalam redaksi. Dirinya menduduki posisi sebagai Dewan Redaksi sampai menjadi Dewan Penasihat. Selain itu, ia juga aktif sebagai kontributor dengan memberikan banyak tulisannya untuk dimuat di dalam majalah. Melalui majalah ini dapat mengetahui lebih banyak berbagai pemikiran dari Soepomo. Sebab disinilah salah satu tempat terpenting baginya untuk dapat bebas menyampaikan pandangan yang dimilikinya. Karena kiprahnya dalam majalah *Mimbar Indonesia* ini membuat Soepomo terpilih menjadi tokoh penting di organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan diangkat sebagai anggota Dewan Kehormatan.

Daftar Rujukan

- Aning S., Floriberta. (2005). *100 tokoh yang mengubah Indonesia: biografi singkat seratus tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia di abad 20*. Yogyakarta: Narasi.
- Asshiddique, J. (2015). *Soepomo: pergulatan tafsir negara integralistik, biografi intelektual, pemikiran hukum adat, dan konstitusionalisme*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Blackburn, S. (2007). *Kongres Perempuan pertama*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Penerangan. (1986). *Sejarah Departemen Penerangan RI*. (1986) Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Gottschalk, Louis. (1985). *Mengerti sejarah*. Jakarta: UI-Press.
- Gunseikanbu. (1944). *Orang Indonesia jang Terkemoeka di Djawa*. Jakarta
- Halkis, M. (2017). *Konstelasi politik Indonesia: Pancasila dalam analisis fenomenologi hermeneutika*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ingleton, John. (2018). *Mahasiswa, Nasionalisme, dan Penjara: Perhimpunan Indonesia 1923-1928*. Depok: Komunitas Bambu.
- Jassin, H. B. (1984). *Surat-surat 1943-1983*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. (2012). *Jurnalistik: Teori & Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lindsay, Jennifer & Maya H. T. Liem. (2011). *Ahli waris budaya dunia: menjadi Indonesia 1950-1965*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Manus et al. (2006). *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Martha, Fajar. (1985). *Prof. Dr. Mr Soepomo: sarjana ahli hukum*. Jakarta: Karya Unipress.
- Niel, Robert van. (2009). *Munculnya elite modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Notodidjojo, Soegijo Ilham; Abdurrachman Surjomihardjo; & Pollycarpus Swantoro. (1977). *Lintasan sejarah P. W. I.* Jakarta: P.W.I. Pusat & Departemen Penerangan.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Purba, Juniar; Dana Listiana; & Yusri Darmadi. (2019). *Penguatan dan pelemahan persatuan bangsa: media dan tokoh di Kalimantan Selatan (1923-1959).* Bandung: CV Media Jaya Abadi.
- Rahman, Momon Abdul et al. (2015). *Jong Java: peranannya dalam persatuan Bangsa.* Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.
- Rahzen, Taufik et al. (2007). *Seabad Pers Kebangsaan (1907-2007).* Jakarta: I:Boekoe.
- Mimbar Indonesia, Halaman Sampul, 10 Juli 1948, No. 28 Tahun II.
- Mimbari Indonesia, Pemberitahuan, 14 Januari 1950, No. 2 Tahun IV.
- Mimbar Indonesia, Halaman Sampul, 6 Januari 1951, No. 1 Tahun V.
- Mimbar Indonesia, Lustrum Madjalah Mimbar Indonesia, 8 November 1952, No. 44-45 Tahun VI
- Mimbar Indonesia, Pengumuman, 5 Oktober 1952, No. 43 Tahun VI.
- Mimbar Indonesia, Halaman Sampul, 1 Januari 1955, No. 1 Tahun IX.
- Salim, Agus. (2019). *Ensiklopedi tokoh nasional Prof. Mr. Soepomo.* Bandung: Nuansa Cendekia.
- Santosa, Puji & Djamari. (2012). *Struktur tematik puisi-puisi mimbar Indonesia.* Yogyakarta: Elmatara Publishing.
- Soegito, A. T. (1977). *Prof. Mr. Dr. R. Supomo.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Supomo. (1948). *Soal: Negara Indonesia Serikat dan Uni Belanda-Indonesia.* Jakarta: Jajasan Dharma.
- Wahyudi, J. B. (1991). *Komunikasi Jurnalistik: pengetahuan praktis kewartawanan, surat kabar-majalah, radio & televisi.* Bandung: Alumni.
- Zuhri, Asikin. (1981). *Ir. P.M. Noor: teruskan gawi kita balum tuntung (kerja kita belum selesai).* Banjarmasin: Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 Kalimantan Selatan.